

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Adisasmita, Rohardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Halim, Abdul dan Muhamad, Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik tentang Demokrasi Kedepan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahsum, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Stratejik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- P. Loino Lalolo. K. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partidipasi*. Jakarta

- Salam, Dharma Styawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang baik” bagian pertama edisi revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Stara Press
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
- Taliziduhu, Ndraha. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta,
- UNDP. 1997. *Good Governance Coneept and Components*. New York: Sustainable Dunia
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widjaja HAW. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers 2008.
- Marjin Kiri Krina, P. Loina. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Governance BPPN.

### **Jurnal**

- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sasaran Good Governance*. Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Vol.2, No. 1
- Umami, Nurodin *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Vol 6 Edisi 11, Okt 2017
- Nasehatun Nafidah, Anisa. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Vol 10, Okt 2017.

## Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Profil data Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi 2021

- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 1(1). Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1). Lestari, S., & Waluyo, L. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono) (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta). Mardiasmo. (2002). Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi. Moleong, L. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mutia, D. R., & Handayani, N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(8). Nurman, (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. on, s. (2015, 11 10). Pengertian Pengelolaan. Retrieved 05 27, 2020, from [swdinside.blogspot.com: https://swdinside.blogspot.com/2015/11 /pengertian-pengelolaan.html#](https://swdinside.blogspot.com/2015/11/pengertian-pengelolaan.html#) Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. Republik Indonesia. (2007). Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ri'a, N. I., & Handayani, N. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BHERAMARI KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(1). Romantis, P. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Sanusi, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 71 Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1-16. Sholihat, W., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *Jurnal Ekonomi*, 25(4), 15. Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008).

Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang. Sugiyono. (2010). “Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)”. Bandung: Alfabeta.

Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DEsa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(1), 1-18.

Waluyo. (2009). Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daer